

# Analisis Preferensi Politik Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa

Soleman Womsiwor<sup>1\*</sup>, Alexander Phuk Tjilen<sup>2</sup>, Edoardus E. Maturbongs<sup>3</sup>, Beatus Tambaip<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Musamus

\* Correspondence: alexander@unmus.ac.id

**Abstrak:** Penelitian bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik dalam pemilihan kepala desa di Kampung Jair dan Kouh, Kabupaten Boven Digoel, Indonesia. Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan masalah manusia, dengan membuat visualisasi mendetail, menganalisis bahasa, memberikan laporan mendalam tentang pandangan responden, dan melakukan penelitian lapangan di lingkungan nyata. Fokusnya adalah pada peran politik informan, dengan menganalisis faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama tinggal di daerah, serta peran profil calon, visi dan misi mereka, dan agama. Selain itu, penelitian akan menelaah dampak kerangka hukum yang mengatur pemerintahan desa terhadap preferensi politik. Temuan penelitian menjelaskan preferensi politik dalam pemilihan kepala desa di Indonesia dipengaruhi oleh rekam jejak, kualifikasi, kepribadian, dan kompetensi calon, bukan ideologi politik. Partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi publik dan kampanye memperkuat demokrasi lokal dengan memungkinkan warga menyuarakan aspirasi dan menilai calon secara langsung. Penyebaran informasi yang efektif tentang calon memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Partisipasi ini meningkatkan kepercayaan terhadap proses demokrasi dan membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat desa.

**Kata Kunci:** Preferensi Politik, Peran Tokoh Masyarakat, Rekam Jejak, Komunikasi, Hubungan Sosial, Agama

**Abstract:** The research aims to understand the factors that influence political preferences in the election of village heads in Jair and Kouh Villages, Boven Digoel Regency, Indonesia. The research method uses descriptive techniques with a qualitative approach to understand social phenomena and human problems, by creating detailed visualizations, analyzing language, providing in-depth reports about respondents' views, and conducting field research in real environments. The focus is on the political role of informants, by analyzing demographic factors such as age, gender, education level, and length of residence in the area, as well as the role of candidate profiles, their vision and mission, and religion. In addition, the research will examine the impact of the legal framework governing village governance on political preferences. Research findings explain that political preferences in village head elections in Indonesia are influenced by track records, qualifications, personalities and competencies of candidates, not political ideology. Active community participation in public discussions and campaigns strengthens local democracy by enabling citizens to voice their aspirations and evaluate candidates directly. Effective dissemination of information about candidates strengthens social ties and creates a transparent and accountable election environment. This participation increases trust in the democratic process and builds more transparent and accountable government at the village level.

**Keywords:** Political Preferences, Role of Public Figures, Track Record, Communication, Relationships Social, Religious.

Received: Mei 2024

Revised: Mei 2024

Accepted: Mei 2024

Published: Mei 2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## 1. Pendahuluan

Politik informan, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa atau kampung di Indonesia, memiliki implikasi yang signifikan dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Pemilihan kepala desa atau kampung bukanlah sekadar acara seremonial, melainkan sebuah peristiwa politik lokal yang memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat di tingkat paling mendasar. (Mariyanti et al., 2024) Pengetahuan tentang profil dan latar belakang calon menjadi kunci dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan integritas calon. Penelitian oleh (Tarom, 2023) menunjukkan bahwa pemilih cenderung mempertimbangkan rekam jejak calon sebelum membuat keputusan. Informasi tentang prestasi atau kontroversi yang terkait dengan calon dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap mereka. Selain itu, visi dan misi calon juga menjadi faktor penentu dalam daya tarik politik mereka. Studi oleh (Ardiani et al., 2019) menyoroti bahwa kejelasan dan konsistensi visi serta kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dapat meningkatkan popularitas calon di kalangan pemilih.

Tingkat pendidikan calon juga memainkan peran penting dalam preferensi politik informan. Penelitian oleh (Yunus et al., 2022) menemukan bahwa pemilih cenderung lebih memilih calon dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, menganggapnya sebagai indikator kemampuan dan kecerdasan dalam memimpin dan mengelola (Colantone & Stanig, 2018). Agama yang dianut calon juga memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi preferensi politik informan. Studi oleh (Pandiangan et al., 2019) menyoroti peran agama dalam membentuk preferensi politik di masyarakat Indonesia. Keberpihakan terhadap calon yang mewakili nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh pemilih dapat menjadi faktor kunci dalam pemilihan.

Selain faktor-faktor demografis dan politik, penting juga untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pemerintahan desa dan wilayah di Indonesia. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bersama dengan peraturan-peraturan turunannya, memberikan landasan hukum yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, administrasi yang baik, dan keadilan (Tjilen et al., 2024). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014 memberikan struktur kelembagaan yang baik bagi pemerintahan desa, termasuk sumber pendanaan yang jelas. Hal ini mencakup penjelasan tentang sumber-sumber pendapatan desa seperti pendapatan asli PAD Desa, tingkat dukungan dari pemerintah kota dan provinsi, serta dana bagi hasil. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang kerangka hukum ini dapat membantu dalam menafsirkan dinamika politik informan dalam konteks pemilihan kepala desa atau kampung (Tambaip, Tjilen, & Ohoiwutun, 2023).

Landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa menekankan pentingnya keanekaragaman, partisipasi, otonomi daerah, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemilihan umum desa diadakan secara serentak di seluruh wilayah, dengan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah kota atau daerah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Urgensi penelitian tentang preferensi politik pemilihan kepala desa sangatlah penting mengingat peran strategis kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan lokal. Kepala desa bukan hanya sekadar figur administratif, tetapi juga merupakan pemimpin lokal yang memiliki tanggung jawab besar dalam membina masyarakat, mengelola sumber daya, dan memajukan pembangunan di tingkat desa (Tjilen, 2019). Dalam konteks ini, preferensi politik pemilihan kepala desa sangat memengaruhi arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian mengenai preferensi politik pemilihan kepala desa menjadi urgensi karena hasil dari pemilihan kepala desa yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menanggulangi tantangan pembangunan saat ini. Kepala desa yang terpilih

dengan dukungan mayoritas masyarakat, dan memiliki visi serta komitmen untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan transparan, akan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan seperti kemiskinan, ketertinggalan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan (Tambaip, Tjilen, & Ohoiwutun, 2023). Selain itu, kepala desa yang mampu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendamaikan perselisihan di antara warga juga akan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan produktif. Dengan demikian, penelitian mengenai preferensi politik pemilihan kepala desa tidak hanya relevan untuk memahami dinamika politik lokal, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa (Saputra et al., 2019).

Lebih lanjut, kepala desa yang terpilih dengan dukungan yang luas dari masyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat akan lebih mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati merupakan mekanisme yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Yaluwo et al., 2024) (Tambaip, Tjilen, Moento, et al., 2023). Dengan demikian, penelitian tentang preferensi politik pemilihan kepala desa tidak hanya relevan untuk memahami dinamika politik lokal, tetapi juga penting untuk menjamin terpilihnya kepala desa yang kompeten dan berkualitas, yang mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik dalam pemilihan kepala desa/kampung di Kampung Jair dan Kouh Kabupaten Boven Digoel – Indonesia, agar menjadi referensi bagi pengguna referensi dalam skala nasional dengan fokus pada peran politik informan, mencakup analisis faktor demografis, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama tinggal di daerah, serta peran profil calon, visi dan misi mereka, dan agama. Penelitian juga akan menelaah dampak kerangka hukum yang mengatur pemerintahan desa terhadap preferensi politik. Diharapkan hasilnya dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika politik lokal dan memperbaiki proses demokrasi serta partisipasi politik di tingkat desa.

## 2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat visualisasi mendetail, menganalisis bahasa, memberikan laporan mendalam tentang pandangan responden, dan melakukan penelitian lapangan di lingkungan nyata. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dari individu dan perilaku yang diamati dalam tulisan dan ucapan. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengajukan pertanyaan, mengevaluasi, dan mengembangkan penelitian berdasarkan teori yang ada.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menemukan makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan ide, memastikan keakuratan data, dan mempelajari sejarah perkembangan (Yaluwo et al., 2024). Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karakter penelitian studi pustaka ini menggunakan data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data-data ini berasal dari publikasi sebelumnya oleh para ilmuwan, laporan jurnalistik, dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan penelitian ini, dan data lain berdasarkan jurnal penelitian yang dapat memperkuat analisis dalam artikel ini.

Lokasi penelitian pada Kampung Kouh dan kampung Jair distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Merauke propinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel Menempati wilayah seluas 27.108,29 km<sup>2</sup> memiliki letak geografis yang berbatas : Utara – Kabupaten Yahukimo dan kabupaten Pegunungan Bintang ; Selatan – Kabupaten

Merauke ; Barat – Kabupaten Mappi ; Timur – berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG).

### 3. Hasil

Referensi politik dalam konteks masyarakat kampung merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor budaya, sosial, dan historis yang memengaruhi pandangan dan preferensi politik individu. Dengan memahami berbagai faktor tersebut, kita dapat melihat bahwa referensi politik dalam masyarakat kampung adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai dimensi budaya, sosial, dan historis. Melalui analisis yang holistik terhadap faktor-faktor ini, kita dapat memahami lebih baik dinamika politik di tingkat lokal dan implikasinya dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Berikut ini adalah tabel yang merangkum pembahasan tentang referensi politik dalam masyarakat kampung.

**Tabel 1.** Faktor-Faktor Referensi Politik di Masyarakat Kampung

Faktor Referensi Politik	Penjelasan	Referensi
Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat	Tokoh-tokoh yang dihormati dan memiliki pengaruh di masyarakat kampung sering menjadi referensi politik. Mereka memiliki pengalaman panjang dalam memimpin atau memberikan nasihat tentang masalah-masalah politik dan sosial.	(Germann et al., 2023) (Holcombe, 2023)
Adat Istiadat dan Tradisi	Nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi referensi politik. Misalnya, prinsip-prinsip keadilan sosial atau tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan mungkin tercermin dalam tradisi lokal.	(Ceylan et al., 2023) (Fadrullah & Syam, 2024)
Agama dan Kepercayaan Keagamaan	Agama sering menjadi faktor penting dalam politik di masyarakat kampung, dan pemimpin agama sering dianggap sebagai referensi otoritatif dalam membuat keputusan politik. Prinsip-prinsip agama dapat mempengaruhi pandangan tentang etika politik.	(Mahardhani et al., 2023)
Hubungan Personal dan Jaringan Sosial	Hubungan personal dan jaringan sosial memainkan peran penting dalam politik masyarakat kampung. Informasi politik sering tersebar melalui hubungan interpersonal seperti teman, tetangga, atau kerabat.	(Figeac & Favre, 2023)
Pengalaman dan Sejarah Lokal	Pengalaman masa lalu dan sejarah masyarakat kampung juga menjadi referensi politik. Pengalaman dengan pemerintahan sebelumnya atau konflik tertentu dapat membentuk pandangan terhadap calon kepala kampung atau kebijakan tertentu.	(Hidayat, 2023)(Mutaqien & Mar'iyah, 2023)

Referensi politik di masyarakat kampung sering kali terwujud melalui beberapa faktor utama. Pertama, tokoh masyarakat atau tokoh adat memegang peranan kunci karena pengalaman panjang mereka dalam memimpin dan memberikan nasihat politik serta sosial yang dihormati oleh penduduk lokal. Kedua, adat istiadat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi mempengaruhi pandangan politik dengan mewariskan nilai-nilai seperti keadilan sosial atau tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Ketiga, agama dan kepercayaan keagamaan memainkan peran penting, di mana pemimpin agama dianggap sebagai otoritas dalam membuat keputusan politik, dengan prinsip-prinsip agama yang membentuk pandangan tentang etika politik. Keempat, hubungan personal dan jaringan sosial memfasilitasi penyebaran informasi politik melalui interaksi interpersonal seperti teman, tetangga, atau kerabat, yang memengaruhi opini

dan dukungan politik lokal. Terakhir, pengalaman dan sejarah lokal, seperti konflik masa lalu atau pengalaman dengan pemerintahan sebelumnya, juga berperan dalam membentuk pandangan terhadap calon kepala kampung atau kebijakan tertentu, mencerminkan pengaruh dari aspek sejarah dalam konteks politik lokal.

Persepsi terhadap calon kepala kampung memiliki dampak yang signifikan dalam politik lokal dan dinamika masyarakat kampung secara keseluruhan. Penilaian terhadap kompetensi calon kepala kampung dapat bervariasi antara individu dan kelompok dalam masyarakat, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, nilai-nilai, dan prioritas individu. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai aspek yang menjadi pertimbangan dalam menilai calon kepala kampung menjadi penting dalam konteks pemilihan kepemimpinan di tingkat kampung.

**Tabel 2.** Persepsi terhadap calon kepala kampung

Aspek Persepsi	Keterangan	Referensi
Pengalaman dan Rekam Jejak	Masyarakat menilai kompetensi calon berdasarkan pengalaman dan rekam jejaknya dalam memimpin atau berkontribusi pada masyarakat sebelumnya. Pengalaman dalam bidang seperti pemerintahan lokal, pembangunan komunitas, atau kegiatan sosial dapat menjadi indikator penting bagi masyarakat.	(Smith & Jones, 2020) (Harsyaf & Khaerah, 2023)
Visi dan Rencana	Calon yang memiliki visi yang jelas dan rencana nyata untuk meningkatkan kondisi di kampung dapat dinilai lebih kompeten. Masyarakat akan menilai sejauh mana rencana calon tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.	(Andari & Wiguna, 2023)
Kemampuan Komunikasi	Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif merupakan kualitas penting bagi seorang pemimpin. Calon yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara baik dan mendengarkan masukan dari mereka akan mendapat penilaian yang lebih baik.	(Rahayu et al., 2024)
Integritas dan Etika	Masyarakat akan menilai calon berdasarkan integritas dan etika pribadinya. Calon yang dikenal jujur, adil, dan memiliki reputasi yang baik akan lebih dihormati dan dianggap lebih kompeten.	(Hoenig et al., 2023)
Kemampuan Memecahkan Masalah	Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dan mengusulkan solusi yang efektif merupakan indikator kompetensi yang penting. Calon yang mampu menghadapi tantangan dengan kreativitas dan keberanian akan dinilai lebih tinggi.	(Huppert et al., 2023) (Johnson, 2020)
Kepemimpinan dan Kemampuan Kolaborasi	Masyarakat akan menilai kemampuan calon dalam memimpin dan bekerja sama dengan masyarakat lainnya. Calon yang mampu membangun hubungan yang baik dan mengoordinasikan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama akan dianggap lebih kompeten.	(Kenny & Langsæther, 2023) (Xiao & Zhang, 2021)

#### 4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kampung Jair dan Kampung Kouh Distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel dapat proses dan pelaksanaan pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Kampung di Kampung Jair dan Kampung Kouh sudah cukup tinggi, mulai dari persiapan pemilihan, kampanye, pemungutan suara bahkan sampai dengan mengawal hasil perhitungan suara. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung di Kampung Jair dan Kampung Kouh referensi politik masyarakat diantaranya dipengaruhi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat, adat istiadat dan tradisi, agama, hubungan personal dan jaringan sosial, dan pengalaman serta Sejarah lokal. Pada akhirnya referensi politik ini saling berinteraksi dan dapat membentuk persepsi masyarakat tentang kepemimpinan, kebijakan, dan partisipasi politik dalam masyarakat kampung.

Dalam proses pemilihan Kepala Kampung Jair dan Kampung Kouh media sosial tidak memiliki pengaruh dalam membentuk opini politik dan dinamika politik secara keseluruhan. Opini politik Masyarakat justru terbentuk dari interaksi sosial di tengah Masyarakat. Hal ini akibat masih kurangnya aksesibilitas jaringan internet di Kampung, selain juga daya beli sebagian besar masyarakat yang masih kurang sehingga perangkat teknologi belum menjadi kebutuhan primer. Persepsi terhadap calon kepala kampung memiliki dampak yang signifikan dalam politik lokal dan dinamika masyarakat kampung secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kampung Jair dan Kampung Kouh Terhadap Calon Kepala Kampung . Dalam proses Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Jair dan Kampung Kouh, masyarakat telah menaruh kepercayaan yang besar terhadap setiap calon yang mereka dukung. Mereka menilai kejujuran dan integritas calon kepala kampung sebagai faktor penting. Calon yang dianggap jujur dan berintegritas tinggi cenderung mendapatkan dukungan lebih besar karena masyarakat percaya mereka akan melaksanakan tugas dengan adil dan transparan.

Faktor ideologi politik calon kepala kampung dapat memengaruhi cara pemilih menilai dan memilih mereka, dalam konteks pemilihan kepala kampung Kampung Jair dan Kampung Kouh, ideologi politik tidak menjadi faktor yang signifikan. Faktor-faktor lain seperti rekam jejak, kualifikasi, kepribadian, dan kompetensi calon juga memainkan peran penting selain ideologi politik. Pemilih lebih cenderung menilai calon berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal, daripada afiliasi politik mereka. Rekam Jejak dan Pengalaman, Pesan Kampanye, Pendukung dan Aliansi Politik, Karakteristik Personal, Pendekatan Kampanye dan Komunikasi, Dampak Sosial dan Ekonomi, Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat, dan Isu-isu Politik dan Sosial.

Masyarakat di Kampung Jair dan Kampung Kouh telah aktif berpartisipasi dalam diskusi publik yang diselenggarakan dalam rangka pemilihan Kepala Kampung di daerahnya. Partisipasi Masyarakat dalam diskusi publik yaitu dengan ikut terlibat dalam kegiatan Forum Publik Terbuka, Debat Publik, Konsultasi Kelompok atau Fokus, dan Sosialisasi Desa atau Kunjungan Door-to-Door. Masyarakat aktif menyebarkan informasi mengenai calon kepala kampung kepada tetangga dan teman-teman mereka. Hal ini mencerminkan adanya jaringan komunikasi yang kuat di antara warga, yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi yang efektif. Dengan berbagi informasi, masyarakat dapat membangun kesadaran bersama tentang kualitas, rekam jejak, dan visi para calon kepala kampung. Informasi ini tidak hanya membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga.

Banyak warga yang secara sukarela menjadi relawan dalam kampanye calon kepala kampung. Relawan ini berperan dalam berbagai aspek kampanye, mulai dari logistik, pengorganisasian acara, hingga komunikasi langsung dengan pemilih. Partisipasi ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari masyarakat untuk mendukung calon yang mereka anggap mampu memimpin kampung dengan baik. Keterlibatan sebagai relawan

juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam proses demokrasi lokal. Kehadiran masyarakat dalam acara-acara kampanye calon kepala kampung juga menjadi indikator penting dari partisipasi aktif mereka. Acara kampanye sering kali dihadiri oleh sejumlah besar warga yang datang untuk mendengarkan langsung visi, misi, dan program-program yang ditawarkan oleh para calon. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas calon, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan para calon secara langsung.

Masyarakat memberikan masukan dan umpan balik kepada calon kepala kampung tentang rencana, visi, dan program-program mereka. Diskusi dan dialog antara calon dan warga ini memberikan kesempatan bagi calon untuk menyesuaikan dan menyempurnakan program mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemberian umpan balik juga menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang akan memengaruhi masa depan kampung mereka.

Temuan terhadap faktor-faktor preferensi politik dapat memainkan peran preferensi politik dalam proses pemilihan kepala kampung. Masyarakat sering kali cenderung memilih calon kepala kampung yang berasal dari suku, agama, atau kelompok sosial yang sama dengan mereka. Hal ini disebabkan oleh rasa solidaritas dan identitas yang kuat terhadap kelompok mereka sendiri. Di banyak daerah, terdapat pola voting tradisional di mana pemilih memilih berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, atau kelompok sosial yang telah dianut oleh keluarga atau komunitas mereka selama bertahun-tahun. Ini menciptakan pola pemilihan yang stabil dan konsisten di antara kelompok-kelompok tertentu.

Pemimpin lokal, termasuk tokoh agama atau tokoh adat, sering memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi dukungan untuk calon kepala kampung tertentu di kalangan anggota komunitas mereka. Dukungan dari pemimpin lokal/adat dapat membantu calon untuk memenangkan kepercayaan dan dukungan dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Isu-isu sosial dan budaya, termasuk isu-isu yang terkait dengan suku atau agama tertentu, menjadi faktor penting dalam pemilihan kepala kampung. Calon yang dianggap lebih mampu atau memiliki komitmen terhadap isu-isu tersebut mungkin lebih didukung oleh anggota komunitas yang terpengaruh oleh isu-isu tersebut. Hubungan antar-kelompok sosial di dalam masyarakat juga memengaruhi proses pemilihan kepala kampung. Calon yang mampu membangun hubungan yang baik dengan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat mungkin lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan yang luas.

Calon kepala kampung dan tim kampanye mereka sering kali menyesuaikan pesan dan strategi kampanye mereka untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ini bisa melibatkan kampanye yang menekankan isu-isu yang penting bagi kelompok tertentu atau menargetkan pesan-pesan kampanye kepada kelompok-kelompok yang spesifik. Dengan demikian, faktor-faktor seperti suku, agama, dan kelompok sosial dapat memiliki dampak yang signifikan dalam proses pemilihan kepala kampung, dan sering kali menjadi pertimbangan penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka.

Persepsi terhadap calon kepala kampung di Kampung Jair dan Kampung Kouh dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Pengalaman dan rekam jejak calon menjadi salah satu pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menilai kompetensi dan keandalan calon tersebut. Pengalaman positif atau prestasi sebelumnya dalam memimpin atau berkontribusi pada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap calon. Pesan kampanye yang disampaikan oleh calon Kepala desa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Pesan yang jelas, konsisten, dan menarik dapat membantu membangun citra yang positif bagi calon di mata masyarakat hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan (Mutamir & Fitriana, 2023). Karakteristik Personal calon seperti integritas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Masyarakat akan cenderung

mendukung calon yang memiliki karakter yang dihargai, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan kreativitas dan keberanian. Pendekatan kampanye dan komunikasi yang digunakan oleh calon juga dapat memperkuat atau melemahkan citra mereka di mata masyarakat. Pendekatan yang terbuka, ramah, dan informatif seringkali lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan pemilih.

Faktor Sosial dan Ekonomi calon juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka, calon yang dikenal aktif dalam membantu masyarakat atau memiliki keberhasilan ekonomi yang dapat dilihat dapat mendapat dukungan yang lebih besar. Selain itu, kebutuhan serta aspirasi masyarakat, serta isu-isu politik dan sosial yang relevan juga turut berkontribusi dalam membentuk persepsi terhadap calon kepala kampung (Habibah & Maulida, 2023). Masyarakat akan cenderung mendukung calon yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka serta memiliki pandangan yang sejalan dengan isu-isu yang mereka anggap penting.

Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon kepala kampung menjadi penting dalam konteks pemilihan kepemimpinan di tingkat kampung. Hanya dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, masyarakat dapat membuat keputusan yang cerdas dan memilih pemimpin yang terbaik untuk komunitas mereka. Hasil analisis berdasarkan temuan penelitian tentang preferensi politik dapat dijelaskan faktor-faktor penyeimbang yang telah dilaksanakan dalam proses pemilihan kepala kampung, Pemerintah Kampung dan masyarakat telah melakukan Langkah-langkah. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih tentang pentingnya memilih berdasarkan kualifikasi, visi, dan program kerja calon, bukan hanya berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, atau kelompok sosial. Pendidikan pemilih dapat membantu mempromosikan budaya politik yang lebih rasional dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Mendorong partisipasi dan representasi yang lebih baik dari berbagai kelompok sosial dalam proses pemilihan kepala kampung. Ini dapat dilakukan dengan memastikan akses yang lebih luas ke informasi, sumber daya, dan peluang politik bagi semua kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok yang mungkin kurang terwakili atau terpinggirkan.

Memastikan bahwa proses pemilihan kepala kampung dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan pengawasan yang memadai dari masyarakat, media, dan lembaga pengawas pemilu. Hal ini dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi politik yang mungkin merugikan kelompok-kelompok tertentu. Mendorong pendekatan pemilihan kepala kampung yang berbasis pada perbandingan kualifikasi, visi, dan program kerja calon, serta evaluasi atas kinerja dan rekam jejak mereka. Ini membantu menempatkan penekanan pada kapasitas dan integritas calon daripada faktor-faktor identitas seperti suku atau agama. Menguatkan institusi-institusi demokrasi lokal, termasuk mekanisme partisipasi publik, ruang diskusi dan dialog, dan lembaga-lembaga pengawas pemilu. Ini membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih terbuka, responsif, dan inklusif bagi semua anggota masyarakat. Mendorong kolaborasi antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh desa atau kampung dan mencari solusi bersama. Kolaborasi ini dapat membantu membangun solidaritas lintas kelompok dan meminimalkan polarisasi politik yang mungkin terjadi. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa proses pemilihan kepala kampung dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan representatif bagi seluruh komunitas, sehingga pemimpin yang terpilih dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat dengan baik.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik dalam pemilihan kepala desa/kampung di Indonesia. Temuan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, penyebaran informasi yang



efektif, dan keterlibatan sukarela dalam memperkuat proses demokrasi lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal, proses pemilihan kepala kampung dapat diperbaiki, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan memperkuat partisipasi politik di tingkat desa. Preferensi ideologi politik tidak menjadi faktor signifikan dalam preferensi pemilih di Kampung Jair dan Kampung Kouh, faktor-faktor lain seperti rekam jejak, kualifikasi, kepribadian, dan kompetensi calon memainkan peran penting. Pemilih lebih cenderung menilai calon berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi publik menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap proses pemilihan kepala kampung. Keterlibatan ini memberikan kesempatan bagi warga untuk menyuarakan aspirasi dan memahami lebih baik program dan visi calon. Diskusi publik juga memperkuat demokrasi lokal dengan memastikan bahwa keputusan pemilihan didasarkan pada informasi yang tepat dan aspirasi bersama.

Jaringan komunikasi yang kuat di antara warga memfasilitasi penyebaran informasi mengenai kualitas, rekam jejak, dan visi para calon kepala kampung. Penyebaran informasi yang efektif tidak hanya membantu warga membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Kesadaran bersama tentang kandidat yang ada menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih transparan dan akuntabel. Kehadiran masyarakat dalam acara kampanye menjadi indikator penting dari partisipasi politik mereka. Melalui acara-acara ini, warga memiliki kesempatan untuk menilai dan membandingkan para calon secara langsung. Partisipasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas calon serta memungkinkan warga untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye dan pemilihan kepala kampung memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Kepercayaan warga terhadap proses demokrasi meningkat ketika mereka merasa terlibat dan didengarkan, yang pada gilirannya membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

## References

- Andari, I. A. M. Y., & Wiguna, I. B. A. A. (2023). Pembelajaran Komunikasi Politik Menyambut Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu*, 5(1), 840–853.
- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18–32.
- Ceylan, G., Anderson, I. A., & Wood, W. (2023). Sharing of misinformation is habitual, not just lazy or biased. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(4), e2216614120.
- Colantone, I., & Stanig, P. (2018). The trade origins of economic nationalism: Import competition and voting behavior in Western Europe. *American Journal of Political Science*, 62(4), 936–953.
- Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional. *Ilmu Dan Budaya*, 45(1), 41–49.
- Figeac, J., & Favre, G. (2023). How behavioral homophily on social media influences the perception of tie-strengthening within young adults' personal networks. *New Media & Society*, 25(8), 1971–1990.
- Germann, M., Mendez, F., & Gemenis, K. (2023). Do voting advice applications affect party preferences? evidence from field experiments in five European countries. *Political Communication*, 40(5), 596–614.
- Habibah, I. I., & Maulida, D. S. (2023). Analisis Efisiensi dan Keberlanjutan Ekonomi Syariah dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia: Bibliography Study. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 63–72.
- Harsyaf, N. F., & Khaerah, N. (2023). Understanding the Electoral Preferences of Beginner Voters in the 2020 Bulukumba Local Elections. *Journal of Contemporary Local Politics*, 2(2), 82–93.
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial*

- Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 856–864.
- Hoenig, L. C., Pliskin, R., & De Dreu, C. K. W. (2023). Political ideology and moral dilemmas in public good provision. *Scientific Reports*, 13(1), 2519.
- Holcombe, R. G. (2023). *Following their leaders: political preferences and public policy*. Cambridge University Press.
- Huppert, E., Herzog, N., Landy, J. F., & Levine, E. (2023). On being honest about dishonesty: The social costs of taking nuanced (but realistic) moral stances. *Journal of Personality and Social Psychology*, 125(2), 259.
- Kenny, J., & Langsæther, P. E. (2023). Environmentalism as an independent dimension of political preferences. *European Journal of Political Research*, 62(4), 1031–1053.
- Mahardhani, A. J., Nawiruddin, N., Jalaluddin, J., & Julhadi, J. (2023). The Kyai's Position in Rural Local Democracy Based on Patronage Politics at Tapal Kuda. *Muslim Heritage*, 8(1), 115–132.
- Mariyanti, E., Sari, P. E., & Putri, S. L. (2024). Analisis Persepsi Pemilih Terhadap Penampilan Calon Dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Calon Perempuan Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 26(1), 216–234.
- Mutamir, A., & Fitriana, F. (2023). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Zainal-Yansen Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020: Political Communication Strategies of Zainal–Yansen on Winning the Election of Kalimantan Governor and Deputy Governor 2020. *Journals of Social, Science, and Engineering*, 2(1), 52–65.
- Mutaqien, A. K., & Mar'iyah, C. (2023). The Conflict of National Elites and Local Elites of PDI-P in the Candidacy Process of Regional Heads Eri Cahyadi and Gibran Rakabuming Raka in the 2020 Pilkada. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(4), 3020–3036.
- Pandiangan, J. E., Zuska, F., Sitorus, H., Ismail, R., & Saladin, T. I. (2019). Analysis on Voters' Preferences in the General Election of Regional Head of 2018 in Dairi Regency. *ADRRRI Journal of Arts and Social Sciences*, 17(2), 18–34.
- Rahayu, L. F., Maulana, E., Safitri, S., Haq, M. I., & Ramadhani, L. S. (2024). Pengaruh Debat Capres Dalam Merebut Pemilih Mengambang Dalam Pemilu 2024. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(2), 127–132.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5–13.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., Moento, P. A., & Riyanto, P. (2023). MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN BUMK. *Nusantara Hasana Journal*, 2(12), 98–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). PERAN FASILITAS KESEHATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 189–196.
- Tarom, M. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 8(2), 108–113.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., & Dharmawan, B. (2024). *Engaging Stakeholders In Policy Decision-Making For Food Security Governance: Identification, Perception, And Contribution*.
- Yaluwo, H., Tjilen, A., Tambaip, B., & Kontu, F. (2024). Decentralization And Welfare: Evaluating The Economic Performance Post-Territorial Division In Boven Digoel Regency, Papua Province, Indonesia. *Agpe The Royal Gondwana Research Journal Of History, Science, Economic, Political And Social SciencE*, 5(4), 17–36.
- Yunus, A., Tamma, S., & Ekawaty, D. (2022). Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65–80.